



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NOFI MARLINA SIREGAR**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **953958**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.650.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/186 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 813 m2/813 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.654 m2/84 m2 di KAB / KOTA PESISIR BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
6. Tanah Seluas 383 m2 di KAB / KOTA PESISIR BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.800.000</b>
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOTOR, PIAGGIO LIBERTY100AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>898.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>548.789.925</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.141.000.000</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.315.589.925
III. HUTANG	Rp.	500.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.815.589.925

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.